

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2022

**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**IRSAD, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19621216 199103 1 003**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	3
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	6
2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	6
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	6
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	8
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja	11
2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	12
2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	12
1. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD	13
2. Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ	13
3. Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi	13
2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA	14
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	15
3.1. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN	15
1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	15
2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	15
3.2. HAMBATAN/ PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	16
1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya	16
2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya	16
BAB IV PENUTUP	17

BAB I

**DATA / INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
DILAKSANAKAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2022**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan hanya dapat dicapai, apabila adanya partisipasi secara aktif dari setiap komponen (*stake holders*) yang ada. Pemerintah, masyarakat dan sektor swasta harus bersatu dalam melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Namun demikian, dari ketiga komponen tersebut, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian tujuan. Tugas-tugas pemerintah secara umum adalah menciptakan ketertiban, keamanan dan rasa keadilan, melindungi hak-hak anggota masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar dalam peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan, menjaga ketersediaan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana sosial lainnya.

Pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik perlu pula indikator-indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dapat diimplementasikan dalam Reformasi Birokrasi.

Tugas-tugas umum pemerintahan di atas, tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang pembagian urusan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membagi habis tugas-tugas tersebut melalui perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan, Biro, Kantor dan Instansi terkait dengan memperhatikan faktor-faktor seperti efisiensi, transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan dan penyempurnaan dalam pelayanan.

Biro merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat sebagai unsur staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas. Aturan yang mendasari pembentukannya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

- Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB II

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
DILAKSANAKAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2022**

2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Unsur pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.020.072.223,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.31.155.886.877,20 atau 91,58%, dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja
Pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
				(Perjanjian Kinerja)		(%)
	1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan fasilitas pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat	Program Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Lembaga Bina Spritual yang aktif	7 Lembaga (LPTQ, MUI, BAZNAS, MES, MCI, BKPRMI, DMI)	9 Lembaga (LPTQ, MUI, BAZNAS, MES, MCI, BKPRMI, DMI, JPRMI, Pemuda Masjid Raya)	128,58%
			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Pemda Embarkasi Haji	sangat puas	sangat puas	100%
			Peringkat dalam event keagamaan Nasional (MTQ/STQ/MQK)	peringkat 10 Nasional	peringkat 5 Nasional	200%

Optimalisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar		Jumlah Hasil Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	6	6	100%
Optimalisasi Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar		Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar yang diimplementasikan	6	6	100%
Meningkatnya Tindaklanjuti Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar		Jumlah Hasil evaluasi Kebijakan yang ditindaklanjuti	6	6	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B(62)	61.33	98.91%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi		Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	B(77)	83.40	108,40%

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Program/Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Persentase realisasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					791.354.425	721.977.266	91.23
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.029.200	9.511.200	86.24
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.401.000	5.401.000	100
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5.628.200	4.110.200	73.03
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					125.558.300	122.984.700	97.95
2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					118.979.000	116.415.400	97.85
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					6.579.300	6.569.300	99.85
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					21.560.500	20.996.000	97.38
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					21.560.500	20.996.000	97.38
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					455.345.225	416.945.516	91.57
4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					54.873.000	54.787.700	99.84
4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan					35.469.000	34.677.000	97.77
4.3	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					365.003.225	327.480.816	89.72

5	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					57.391.200	57.245.000	99.75
5.1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya					57.391.200	57.245.000	99.75
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					12.100.000	6.000.000	49.59
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12.100.000	6.000.000	49.59
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					108.370.000	88.294.850	81.48
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					61.690.000	48.737.950	79
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					34.100.000	33.614.400	98.58
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					12.580.000	5.942.500	47.24
II	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					33.228.717.798	30.433.909.611	91.59
1	Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual					32.048.080.048	29.352.355.290	91.59
1.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual					1.242.576.650	1.218.552.644	98.07
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual					30.805.503.398	28.133.802.646	91.33
2	Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					616.804.500	569.168.313	92.28
2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang					353.030.500	342.184.752	96.93

	Pendidikan							
2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan					106.612.000	88.537.700	83.05
2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial					157.162.000	138.445.861	88.09
3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					563.833.250	512.386.008	90.88
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata					173.106.000	155.508.500	89.83
3.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja					208.907.000	193.343.550	92.55
3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan					181.820.250	163.533.958	89.94

Tabel 2.3
Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing
Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Program Bina Mental Spiritual			
1	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	<ul style="list-style-type: none"> • Terlambatnya pencairan dan bantuan hibah • Realisasi hibah rendah karena ada pengurus tudak mau mencairkan dananya karena bantuan kecil 	Jemput bola kelokasi	

3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan, dicapai dengan pelaksanaan :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output kegiatan ini adalah terselesaikannya Lakip, Renstra, Pelaporan Biro Kesra sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 1 (Satu) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

b. Program Kesejahteraan Rakyat, dicapai dengan pelaksanaan :

1. Meningkatkan fasilitasi pembangunan dan pengembangan bina spiritual masyarakat
2. Mengoptimalkan Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar

sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

3. Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.
4. Meningkatkan Tindaklanjut Hasil Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.

Dari 4 (Empat) kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target dan tujuan program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana table berikut :

Tabel 2.4

Kebijakan Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1			
NIHIL			
2			

2.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Biro Kesejahteraan Rakyat, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

Tabel 2.5

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1			
NIHIL			
2			

2. Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

Tabel 2.6

Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Pansus LKPJ Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1			
NIHIL			
2			

3. Tindak Lanjut rekomendasi Fraksi

Tabel 2.7

Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

No	Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4

1			
NIHIL			
2			

2.4 PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barar Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

Tabel 2.8

Penghargaan yang Diraih Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
1	2	3	4	5
1				
NIHIL				
3				

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN

3.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 tidak ada mendapatkan alokasi anggaran yang berhubungan dengan Tugas Pembantuan .

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Alokasi Anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Tugas Pembantuan
1					
2				NIHIL	
3					

2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 tidak ada mendapatkan alokasi anggaran yang berhubungan dengan Tugas Pembantuan .

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan, dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Alokasi Anggaran dan Realisasi Penugasan Tahun 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Penerima
----	---------	-----------	----------------	----------------	----------

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Penerima
1					
2			NIHIL		
3					

3.2 HAMBATAN/ PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

1. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

a. Permasalahan

NIHIL.

b. Upaya Penyelesaian

NIHIL.

2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

a. Permasalahan

NIHIL.

b. Upaya Penyelesaian

NIHIL.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.